

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk selalu berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik (*good government*). Pemerintah yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan *good government* maka terjadilah reformasi dalam pengelolaan keuangan. Diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014, kemudian disempurnakan dengan UU No. 9 tahun 2015 serta untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 tahun 2004 (Dien et al, 2015).

Kedua undang-undang ini erat kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan di masing-masing daerah. Dalam UU No. 33 tahun 2004 menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan instansi vertikal perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan (Dien et al, 2015).

Keberhasilan dari otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar (Ramli, 2016).

Selain memiliki berbagai anggaran, pemerintah juga memiliki belanja. Belanja adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota (Ramli, 2016).

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintahan daerah terdiri atas belanja pegawai,

belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga (Ramli, 2016).

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan komponen penting yang mendapat menggambarkan bagaimana kinerja keuangan yang telah dilaksanakan. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan dalam menghasilkan pendapatan yang merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakannya, karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka tindakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja daerah sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan di masa mendatang

Analisis pengukuran belanja dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio pertumbuhan belanja adalah untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja. Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan oleh rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif, artinya tidak ada

standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaiknya jika lebih maka mengidentifikasi telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2016).

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Selisih anggaran belanja dikategorikan selisih wajar (*favourable variance*) apabila realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya, dan dikategorikan selisih tidak wajar (*unfavourable variance*) apabila realisasi belanja lebih besar dari anggarannya (Mahmudi, 2016). Rasio keserasian belanja adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi dan belanja modal yang digunakan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Yoyo, 2017).

Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Indra, dkk (2016) yang berjudul Analisis Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja pada tahun 2012-2014 pemerintah kabupaten Minahasa terjadi efisiensi penggunaan anggaran dan pemerintah kabupaten Minahasa mengalami pertumbuhan belanja dari tahun 2012-2014. Penelitian sejenis dilakukan oleh Ika (2018) yang berjudul Analisis Anggaran Belanja Daerah

sebagai Alat Pengendalian pada BPKAD Kabupaten Bombana Tahun 2015 - 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2015 dan 2016 dikategorikan menguntungkan (favorable) karena jumlah realisasi lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran belanja daerah yang telah direncanakan, sehingga dapat dikatakan bahwa BPKAD Kabupaten Bombana telah mampu melakukan efisiensi belanja.

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2014	Belanja Operasi	611.180.845.236,86	535.817.188.568,00	87,60
	Belanja Modal	173.493.792.705,40	107.974.476.236,00	62,21
	Belanja Tidak Terduga	650.000.000,00	0	0
	Total Belanja Daerah	785.324.637.942,26	643.791.664.804,00	81,98
2015	Belanja Operasi	642.129.823.000	569.098.017.000	88,63
	Belanja Modal	235.380.557.000	156.625.428.000	66,54
	Belanja Tidak Terduga	325.000.000	0	0
	Total Belanja Daerah	887.835.380.000	725.723.455.000	81,74

Sumber : (LKPD Kab. TTU)

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui adanya fenomena kenaikan anggaran belanja pada dua tahun anggaran belanja yaitu tahun 2014 dan 2015 dalam hal ini presentase kenaikan realisasi belanja operasi pada tahun 2015 adalah 1,03% dari realisasi anggaran belanja operasi tahun 2014, sedangkan presentase kenaikan pada realisasi belanja modal tahun 2015 adalah 4,33%

dari realisasi anggaran belanja modal tahun 2014. Namun jika diukur dengan analisis keserasian belanja dari mahmudi 2016, maka belanja modal pada tahun 2015 adalah 21,58% dari total realisasi belanja dan masih belum seimbang karena melebihi ukuran kriteria keserasian belanja yaitu 5%-20%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan realisasi anggaran belanja tiap tahunnya belum tentu menunjukkan kinerja belanja yang baik, oleh karena itu perlu dilihat varians, keserasian, efisiensi, dan pertumbuhan belanja untuk mengetahui kinerja belanja tiap tahunnya sudah terealisasi dengan baik atau efisien. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengambil judul **“Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2015-2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015-2017 dilihat dari analisis varians belanja?
2. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015-2017 dilihat dari analisis pertumbuhan belanja?

3. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015-2017 dilihat dari analisis keserasian belanja ?
4. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015-2017 dilihat dari rasio efisiensi belanja daerah ?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder di pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi NTT tahun 2015-2017.
2. Rasio yang digunakan yaitu :
 - 1) Rasio Varians Belanja
 - 2) Rasio Analisis Pertumbuhan Belanja
 - 3) Rasio Keserasian Belanja menggunakan dua (2) rasio :
 - a) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja
 - b) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
 - 4) Rasio Efisiensi Belanja

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui dan menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015-2017 dilihat dari analisis varians belanja
2. Mengetahui dan menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015-2017 dilihat dari analisis pertumbuhan belanja.
3. Mengetahui dan menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2015-2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilihat dari dilihat dari analisis keserasian belanja.
4. Mengetahui dan menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2015-2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilihat dari rasio efisiensi belanja daerah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak :

1. Bagi Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu pihak keuangan, terutama pihak pengelola anggaran daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam meningkatkan efisiensi anggaran belanja daerah.

2. Bagi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan untuk kemajuan penelitian di Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan sebagai sarana memperkaya pengetahuan dan berlatih dalam meneliti suatu kasus untuk pengembangan ilmu akuntansi kedepannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang uraian mengenai teori yang menunjang penelitian dan sebagai dasar dalam penelitian untuk mengolah dan menganalisis data.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang Kabupaten TTU berdasarkan data-data yang diperoleh, dan menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.